

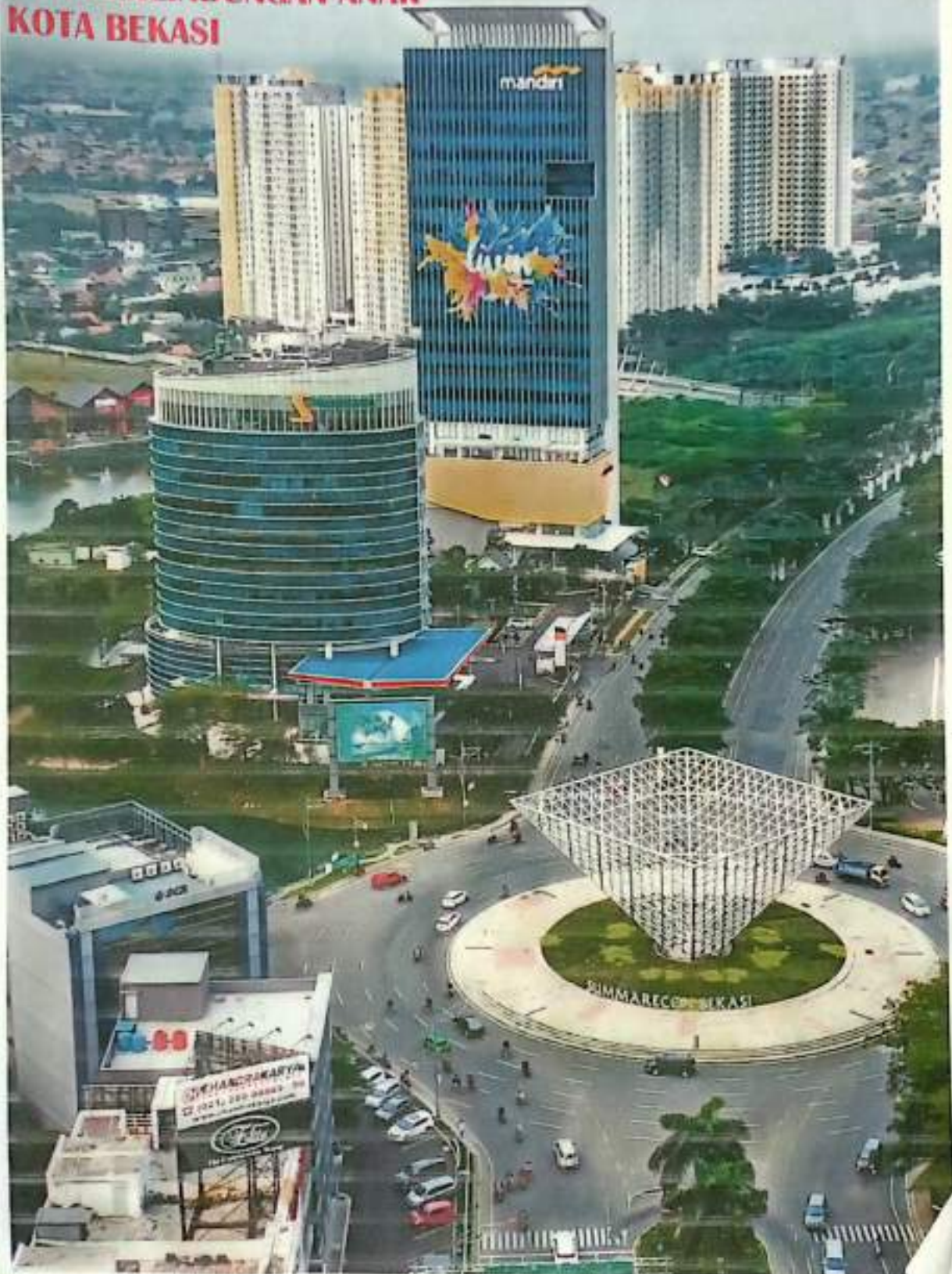


BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

RENCANA KERJA TAHUN 2026 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mengacu pada kerangka arahan yang telah ditetapkan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2026 Kota Bekasi dan merupakan tahap selanjutnya dari rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan. Renja Kerja (Renja) Tahun 2026 memuat hasil evaluasi tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran serta perubahan rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam perumusan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 guna pencapaian target-target kinerja sasaran pembangunan sebagaimana dalam rancangan RKPD Tahun 2025.

Bekasi, September 2025

Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



drh. SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI, M.M
NIP. 19710608 199803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DPPPAA KOTA BEKASI TAHUN LALU.....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPPPAA Kota Bekasi Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPPPAA Kota Bekasi.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPPPAA Kota Bekasi.....	34
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPPAA ...	45
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	51
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	70
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPPPAA KOTA BEKASI.....	81
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	81
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPPPAA Kota Bekasi.....	85
3.3 Program dan Kegiatan.....	89
3.3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).....	89
3.3.2 Program dan Kegiatan DPPPAA Kota Bekasi 2026.....	92
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPPPAA KOTA BEKASI.....	97
BAB V PENUTUP.....	125
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPAA dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 Kota Bekasi.....	17

Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.....	44
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	53
Tabel 2.5	Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Hasil Musrenbang Prioritas dan Kebijakan atas Kepala Daerah yang terpilih Tahun Anggaran 2026.....	72
Tabel 3.1	Korelasi antara Prioritas Nasional, Isu Strategi dan Strategi Utama Kota Bekasi.....	83
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPPAA Kota Bekasi Tahun 2025 - 2030.....	87
Tabel 4.1	Rencana Pendanaan APBD DPPPAA Kota Bekasi Tahun 2026.....	99
Tabel 4.2	Rencana Kerja DPPPAA Kota Bekasi Tahun 2026.....	102

BAB I

PENDAHALUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 126 mengamatkan bahwa Kepala Perangkat Daerah agar Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rencana Kerja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah serta rumusan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2026 yang mengacu dan memperhatikan :

1. Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPP	

2. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2026;
3. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2025. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 diawali dengan membuat Rancangan Akhir Rencana Kerja mengacu pada Rancangan RKPD Kota Bekasi, serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

2

Paraf Koordinasi	
✓/	Kepala Bappelitbangda
	Kepala Bagian Hukum
	Pjt. Kepala DPPP

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Paraf Koordinasi	
✓	Kepala Bappelitbangda
	Kepala Bagian Hukum
	Pt. Kepala DPPPA

Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPP	

- Tahun 2017 Nomor 320);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA	

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Berita Daerah Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	

Tahun 2023 Nomor 13);

38. Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 86);
39. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 27.A);
40. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
41. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 41);
42. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 74) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
43. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024).
44. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
45. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA	

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2026 adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, sesuai dengan rencana program prioritas yang telah digariskan dalam Rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA, rancangan PPAS Tahun 2026;
2. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke dalam rencana operasional tahunan;
3. Menyediakan arahan/pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2026;
4. Menjadi alat ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
7. Mencapai pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Rancangan Akhir Rencana

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPP	

Kerja perangkat daerah, keterkaitan antara usulan Rancangan Renja dengan Rancangan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2025 (n-1); analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA	

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPPPA TAHUN LALU

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah Organisasi Perangkat Daerah yg dibentuk untuk mengemban amanah membantu Wali Kota/Wakil Wali Kota Bekasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

Evaluasi kinerja selain untuk menunjukkan capaian, juga berfungsi sebagai alat verifikasi apakah suatu kebijakan, program atau kegiatan, dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauhmana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Tahun 2024. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025. Evaluasi atau reuiu akan dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 serta realisasi target sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024. Selain itu juga akan dilakukan reuiu terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dan proyeksi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	

realisasi anggaran tahun 2026.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode 2024-2026. Selama periode Renstra 2024 hingga 2026 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami beberapa kali penyesuaian terhadap program dan kegiatan beserta indikator kerjanya. Program dan kegiatan beserta indikator kinerja pada tahun 2025 merupakan tahun transisi, dimana program dan kegiatan tahun 2025 mulai disusun pada tahun 2024, yakni tahun kedua periode Renstra 2024-2026 berjalan. Program dan kegiatan tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024. Program dan kegiatan Renstra periode 2024-2026 baru benar-benar digunakan mulai tahun 2024, sehingga capaian kerjanya pun tidak dapat dibandingkan. Dan pada tahun 2022-2023, seiring dengan adanya Rancangan Perubahan RPJMD, program dan kegiatan Perangkat Daerah pun mengalami penyempurnaan.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Proses perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 dilakukan dengan menyelaraskan antara Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses pemetaan terdiri dari penyelarasan tingkat, urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dan anggaran yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi beserta jajarannya didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Walikota Bekasi Nomor 6

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPP	

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Sesuai dengan APBD Penetapan Tahun Anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 5 program dan 18 kegiatan dan 30 sub kegiatan, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 17.230.860.360,-. Namun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja yang tengah berjalan, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak melakukan perubahan baik dari sisi jumlah program dan kegiatan, pendanaan serta target prioritas kinerja, namun tetap selaras dengan kebijakan Pemerintah serta mempedomani Rancangan Perubahan Renstra.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pada Triwulan III tahun 2024 Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan Pergeseran Anggaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Fase pergeseran ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pergeseran anggaran untuk pembayaran :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkurang sebesar Rp. 200.000.000,- dengan adanya pegawai pensiun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang bertambah sebesar Rp. 1.774.062.125,- terdiri dari :
 - APBD Kota Bekasi Tahun 2024 Rp. 288.545.000,- yang berasal dari dana alokasi insentif fiskal.
 - Bantuan Provinsi sebesar Rp. 1.485.517.125,- untuk kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
3. Program Perlindungan Khusus Anak sebesar Rp. 165.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pengacara, Honorarium Jasa Tenaga Pendamping Kasus dan Honorarium Jasa Tenaga Ahli Psikolog.

Berbeda dengan penganggaran tahun 2024, proses perencanaan anggaran

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPP	

tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam hal ini, terdapat perubahan indikator kinerja yang digunakan antara tahun 2024 dengan 2025, dimana terdapat penyempurnaan indikator beserta target kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, arah kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Secara ringkas, berikut ini akan ditampilkan tabel realisasi capaian program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024 :

Paraf Koordinasi	
th	Kepala Bappelitbangda
	Kepala Bagian Hukum
	Plt. Kepala DPPPA

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPA dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kota Bekasi




Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan DPPPA 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9+7-8)	11=(10/9)
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
01	01	Program Perancang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	100	100	94.13	94,13%	100	294,13	-
		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	-	-	-	-	100	100	100%
01	01	201	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	100	100%	100	300	-
		Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100	100	100	100%	100	300	-
		Jumlah Dokumen	10	-	-	-	-	10	-	-

14

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelibangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	




				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Dokumen					Dokumen		
01	201	06	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	-	-	-	-	6 Dokumen	-	-
01	201	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	38 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	4 Laporan	47 Laporan	7,83%
01	01	202	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah	-	100	100	100	100%	100	300	-
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%
01	202	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1 008 Orang	2 496 Orang	448 Orang	448 Orang	100%	672 Orang	3 616 Orang	3,59%
		05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	1 Laporan	10 Laporan	10%
				Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparelnr	-	100	100	92,17	92,17%	100	202,17	-
				Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP	Nilai 88,24	-	-	-	-	-	-	-

15

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala D'PPA	




01	01	205		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN/ Perangkat Daerah Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	100	100	100	100%	100	300	-
					Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
01	205	02		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kegiatan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-
01	205	09		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	20 Orang	11 Orang	11 Orang	100%	8 Orang	39 Orang	-
01	01	205		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	-	100	100	100	100%	100	300	3%
					Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	7 Laporan	-	-	-	-	8 Laporan	8 Laporan	1,14%
01	206	01		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	9 Paket	3%
01	206	04		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	9.129 Unit	38 Paket	38 Paket	100%	4 Paket	9.171	183,42%
01	206	06		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	3 Dokumen	2 Paket	2 Paket	100%	3 Paket	8	2,67%
01	206	07		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	15.696 Buku	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	15.701	157,01%
01	206	08		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 Laporan	28 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Laporan	33	3,3%

16




Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DIPPDA	

01	206	09	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3%
01	206	10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	490 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	100%	12 Laporan	652 Laporan	65,2%
				Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	100	100	100	100%	100	300	-
				Persentase pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel	100%	-	-	-	-	100	100	100%
01	01	207	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100%	100	300	3%
01	207	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	30 Unit	-	-	-	0%	-	0	0%
01	207	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	10 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	10 Unit	25 Unit	0%
01	01	208	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100%	100	300	3%
01	208	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	480 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	12 Laporan	500 Laporan	500%
01	208	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	804 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	12 Laporan	830 Laporan	830%
01	01	209	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	100	300	3%




17

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPP	

01	209	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	12 Unit	60 Unit	60 Unit	100%	6 Unit	78 Unit	13%
01	209	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 Unit	44 Unit	156 Unit	156 Unit	100%	13 Unit	213 Unit	16,38%
01	209	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	258 Unit	64 Unit	64 Unit	100%	25 Unit	387 Unit	15,48%
02	02		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan									
				Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	-	100	49,90	46,97	54,13%	-	-	-
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	53,89	-	-	-	0%	53,39	53,36	99,07%
02	02	201	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Persentase capaian pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kab/kota	-	-	-	-	0%	100	100	100%
				Jumlah Laporan Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
02	201	03	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan	-	424 OPD	44 OPD	44 OPD	100%	44 OPD	512 OPD	11,64%


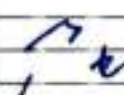

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	

			PUG termasuk PPRG	pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan kab/kota								
				Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	-	-	-	-	-	765 Orang	765 Orang	-
02	02	202	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Persentase capaian pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota	-	100	100	100	100%	100	300	-
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
02	202	02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1.094 Orang	40 Organisasi	40 Organisasi	100%	40 Organisasi	1.174	-
02	202	09	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang	640 Orang	-	-	-	-	-	-	-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA	


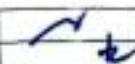
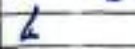
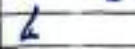
			ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	mendapatkan bimtek atau pelatihan								
02	02	203	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/kota	Persentase capaian pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	-	100	100	100	100%	100	300	-
	02	203	01 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	-	5 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100%	4 Lembaga	12 Lembaga	-
	02	203	02 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	-	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	300 Orang	-
	02	203	03 Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota yang tersedia	-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	4 Dokumen	16 Dokumen	-
02	02		Program Perindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	(5.03)					64.1%		
	03	201	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Tingkat Kab/Kota	Persentase Capaian Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Tingkat Kab/Kota	-	100	100	100	100%	100	300	-
			02 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	-	44 Perangkat Daerah	100 Perangkat Daerah	100 Perangkat Daerah	100%	12 Perangkat Daerah	156 Perangkat Daerah	-

20

Paraf Koordinasi	
	
Kepala Bappelibangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA 	

				Kabupaten/Kota								
03	202	09	Sub Kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	120 Orang	-	-	-	-	-	-	-
			Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Kegiatan Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	120 Orang							
			Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100	100	100	100%	100	300	3%
			SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	65 Orang	80 Orang	85 Orang	85 Orang	100%	65 Orang	230 Orang	3.54%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban	115 Layanan	115 Layanan	-	-	0%	100 Layanan	215 Layanan	1.87%

22

Paraf Koordinasi	
 Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPP	




			Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
			KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100	100	100	100%	100%	300	3%
			SUBKEGIATAN Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	9 Dokumen	2.25%
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase pemenuhan Hak anak dalam 5 Klaster	100%					100%		
			KEGIATAN Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100	100	100	100%	100%	300	3%
			Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	290 Organisasi	285 Orang	290 Organisasi	290 Organisasi	100%	290 Organisasi	885 Organisasi	2.98%

23







Paraf Koordinasi	
✓h Kepala Bappelitbangda	✓
Kepala Bagian Hukum	✓
Plt. Kepala DPPPA ✓	✓

			KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100	100	100	100%	100	300	3%
			SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.364 Orang	697.586 Orang	2.364 Orang	2.364 Orang	100%	2.364 Orang	702.314 Orang	297.08%
			SUB KEGIATAN Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	14 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	30 Dokumen	3.75%
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100%				100%			
			KEGIATAN Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksana pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100	100	100	100%	100%	300	3%
			SUB KEGIATAN Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	12 Perangkat Daerah	64 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	100%	10 Perangkat Daerah	80 Perangkat Daerah	6.67%
			KEGIATAN Penyediaan	Persentase capaian	100%	100	100	100	100%	100	300	3%

24

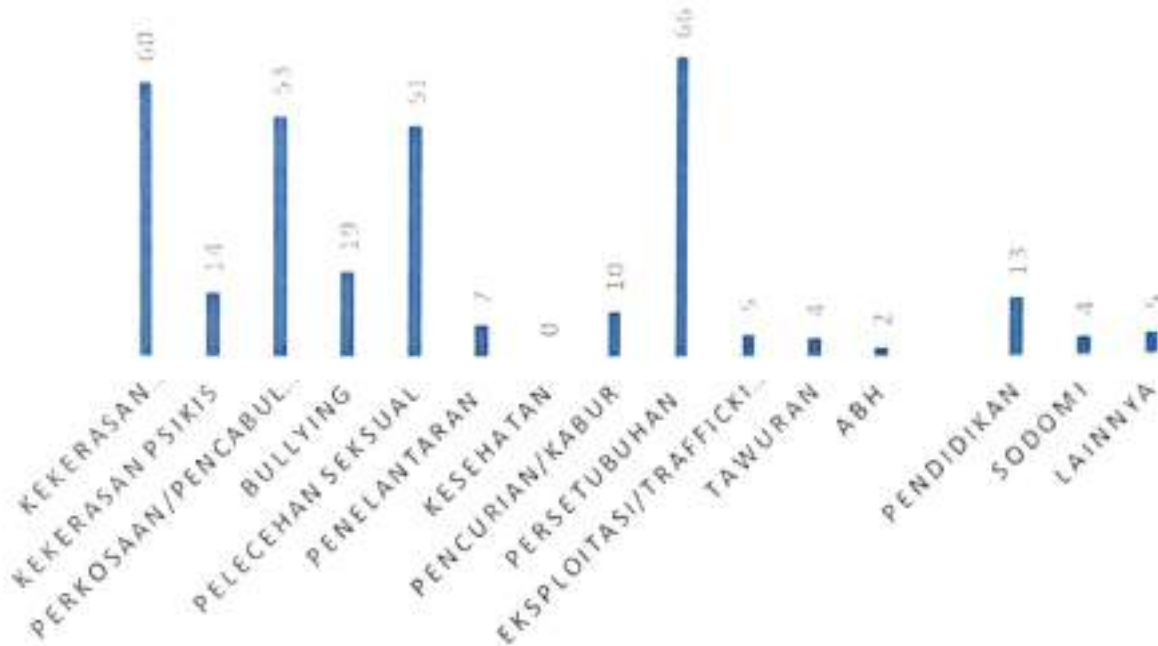
	Paraf Koordinasi
	Kepala Bappelitbangda 
	Kepala Bagian Hukum 
	Plt. Kepala DPPPA  

			Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus koordinasi tingkat daerah kab/kota								
			SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	410 Layanan	222 Layanan	390 Layanan	390 Layanan	100%	405 Layanan	1.017 Layanan	2.48%
			SUB KEGIATAN Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapat layanan	100 Layanan	44 Layanan	15 Layanan	15 Layanan	100%	105 Layanan	164 Layanan	1.64%
			KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah/Kota	Persentase capaian pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	100%	100	100	100	100%	100	300	300%
			SUB KEGIATAN Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	4 Dokumen	28 Dokumen	7%

Paraf Koordinasi	
 Kepala Bappelitbangda	
 Kepala Bagian Hukum	
 Plt. Kepala DIPPDA	

Grafik 2.1.b
 Korban Kekerasan terhadap Anak yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
 di P2TP2A Tahun 2024

DATA KEKERASAN PADA ANAK TAHUN 2024



Sumber: P2TP2A Kota Bekasi

❖ **Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**




Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan program penunjang penyelenggaraan urusan kantor yang bersifat rutin, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan lain-lain.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yakni Nilai Hasil Evaluasi AKIP, sumber data capaian indikator kinerja ini merupakan Hasil Evaluasi AKIP

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA	

berdasarkan aktivitas yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bekasi.

Dalam upaya pencapaian kinerja penyelenggaraan program Tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memfokuskan pada hal-hal kunci (*Focusing on Critical Things*) Laporan Kinerja yang baik yang menunjukkan pencapaian kinerja instansi pemerintah. Fokus Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah mengarahkan daya upaya untuk untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pjt. Kepala DPPPA	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPP Kota Bekasi

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan 3 urusan wajib yaitu urusan pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga, urusan pemenuhan hak anak dan urusan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Keluarga
Tujuan, sasaran dan program yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga adalah sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator
Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender
Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Capaian Pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota
	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

Untuk mencapai kinerja output urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, 1 (satu) program yang dilaksanakan adalah Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, tantangan dalam pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga.

Berbeda dengan krisis sebelumnya, saat ini pekerjaan perempuan tertimpa risiko lebih besar dibandingkan pekerjaan laki-laki, terutama karena dampak

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPP	

penurunan pada sektor jasa. Pada saat yang sama, perempuan menjadi penyumbang sebagian besar pekerja dalam pekerjaan garis depan, terutama di sektor kesehatan dan perawatan sosial. Selain itu, meningkatnya beban perawatan tidak dibayar yang ditimbulkan oleh krisis lebih banyak berdampak pada perempuan dibandingkan laki-laki". Walau capaian program rendah, namun kegiatan-kegiatan pada DPPPA Kota Bekasi terlaksana 100%.

Dalam mengatasi tantangan di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan arahan Kepala Dinas PPPA Kota Bekasi telah berusaha meningkatkan capaian kinerja di tahun 2024 dengan melakukan updating data, melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Perangkat Daerah lain dan para stakeholder terkait, berkenaan dengan penyediaan lapangan kerja khusus untuk perempuan, dan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, tidak saja pada bidang swasta namun juga pada bidang pembuatan keputusan seperti pada badan legislative.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemenuhan Hak Anak

Urusan ini mempunyai sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak, untuk mencapai kinerja output urusan pemenuhan hak anak adalah Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator
Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat	Predikat Kota Layak Anak
Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Persentase pemenuhan Hak anak dalam 5 Klaster
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Capaian Pelaksanaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

29

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	

	Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
--	--

Tolak ukur dari Program Pemenuhan Hak Anak adalah jumlah pelembagaan yang memprioritaskan pemenuhan hak anak, antara lain Pelayanan Publik Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak.


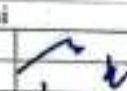

Dengan diterbitkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak telah terpenuhi pemenuhan hak anak pada kluster 4, dimana tujuan sekolah ramah anak :

- Adanya keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan hak atas pendidikan bagi semua anak termasuk penyandang disabilitas, korban bencana, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya;
 - Mendorong sekolah berperan penting dalam kehidupan anak sebagai tempat belajar, pengembangan dan sosialisasi;
 - Menghindari hukuman yang berakibat cedera baik secara fisik maupun psikis.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Urusan ini mempunyai 2 (dua) program dan 2 (dua) indikator program Peningkatan yakni persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan persentase penanganan kasus terhadap anak.

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator
Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat	- Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO - Persentase anak korban kekerasan yang ditangani
- Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO	- Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO
- Meningkatnya perlindungan	- Persentase anak korban kekerasan yang


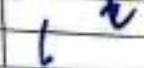

30

Paraf Koordinasi	
 Kepala Bappelitbangda Kepala Bagian Hukum Plt. Kepala DPPPA	 

anak dari kekerasan, eksploitasi dan penculikan	ditangani
- Program Perlindungan Perempuan	- Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan Jakarta yang berhasil dimutakhirkan
- Program Perlindungan Khusus Anak	- Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak

Setiap manusia mendambakan rasa aman dan terlindungi dari rasa takut terhadap segala bentuk kekerasan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari setiap orang tanpa memandang jenis kelamin dan status dapat saja mendapatkan perlakuan kekerasan baik dari orang-orang terdekat maupun orang yang tidak dikenal. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan bagi warga negaranya termasuk negara Indonesia sebagai negara hukum. Negara Indonesia sebagaimana negara lainnya tidak lepas dari berbagai masalah hukum termasuk masalah-masalah kekerasan, karena itulah Negara melalui pemerintahnya harus mampu menjamin keselamatan dan keamanan bagi warga negaranya. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Pasal-Pasal dalam UUD tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Demikian pula dengan hak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Walaupun sudah ada beberapa peraturan yang dibuat untuk melindungi warga negara terutama perempuan dan anak yang merupakan individu yang lebih rentan dan mudah untuk menjadi korban, namun angka kekerasan yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia termasuk Kota Bekasi masih sangat tinggi dan cenderung bertambah setiap tahunnya.

Salah satu penyumbang besar angka kasus kekerasan perempuan adalah Kota Bekasi setiap tahunnya, kasus kekerasan perempuan tahun 2023 sebanyak 33 kasus sedang kasus kekerasan anak tahun 2023 sebanyak 220 kasus, dengan rincian kasus anak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebanyak 139

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	

kasus dan kasus anak yang ditangani oleh Unit PPA Polres Metro Kota Bekasi sebanyak 81 kasus.

Target kinerja pelayanan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rentang 5 (lima) tahun dapat dilihat untuk :

1. Predikat Anugerah Parahita Ekapraya

Realisasi dari tahun ke tahun sesuai target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama.

2. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO

Realisasi Target Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 **tidak mencapai target**, dimana kasus dari tahun ke tahun meningkat. Pencapaian Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO pada Tahun 2023 target adalah 1 : 4.750, sedangkan realisasi Tahun 2023 1 : 2.380. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO Tahun 2023 **tidak mencapai target**, ketidakcapaian target di Tahun 2023 dikarenakan masih banyak kekerasan yang dialami oleh Perempuan di Kota Bekasi. Untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi melaksanakan sosialisasi dan kampanye atas kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Predikat Kota Layak Anak

Realisasi Target Indikator Predikat Kota Layak Anak dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023, pada Tahun 2020 melebihi target yang mana target Tahun 2020 predikat Madya dan realisasinya predikat Nindya. Di Tahun 2020 Predikat Kota Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki prestasi yang bagus, akan tetapi prestasi tersebut tidak bisa

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelithangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPP	

kasus dan kasus anak yang ditangani oleh Unit PPA Polres Metro Kota Bekasi sebanyak 81 kasus.

Target kinerja pelayanan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rentang 5 (lima) tahun dapat dilihat untuk :

1. Predikat Anugerah Parahita Ekapraya

Realisasi dari tahun ke tahun sesuai target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama.

2. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO


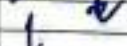

Realisasi Target Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 **tidak mencapai target**, dimana kasus dari tahun ke tahun meningkat. Pencapaian Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO pada Tahun 2023 target adalah 1 : 4.750, sedangkan realisasi Tahun 2023 1 : 2.380. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO Tahun 2023 **tidak mencapai target**, ketidakcapaian target di Tahun 2023 dikarenakan masih banyak kekerasan yang dialami oleh Perempuan di Kota Bekasi, untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi melaksanakan sosialisasi dan kampanye atas kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Predikat Kota Layak Anak

Realisasi Target Indikator Predikat Kota Layak Anak dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023, pada Tahun 2020 melebihi target yang mana target Tahun 2020 predikat Madya dan realisasinya predikat Nindya. Di Tahun 2020 Predikat Kota Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki prestasi yang bagus, akan tetapi prestasi tersebut tidak bisa

Paraf Koordinasi	
Kepala Bupelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPP	

dipertahankan pada Tahun 2023. Pencapaian Indikator Predikat Kota Layak Anak Tahun 2023 dengan target Nindya dengan hasil **tidak sesuai target** turun menjadi Madya, dengan ketidak berhasilnya karena Kurangnya pemenuhan data pada indikator penilaian KLA dengan adanya perubahan dalam komponen penilaian dari tahun sebelumnya sehingga data pendukung yang disiapkan dianggap tidak memenuhi syarat verifikasi penilaian oleh Kementerian PPPA sehingga banyak yang tidak terpenuhi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memperbaiki kesalahan di tahun 2023 sehingga untuk Tahun 2024 bisa mencapai target, dimana Tahun 2024 **target sesuai** dengan predikat Nindya sesuai Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026. Adapun Nilai Kota Layak Anak yang didapat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada Tabel dibawah ini :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPP	

Desain	Kategori Kota	Nilai Kota PA	Nilai Kota KA
0010001	0010001	800	800
0010002	0010002	800	800
0010003	0010003	800	800
0010004	0010004	800	800
0010005	0010005	800	800
0010006	0010006	800	800
0010007	0010007	800	800
0010008	0010008	800	800
0010009	0010009	800	800
0010010	0010010	800	800
0010011	0010011	800	800
0010012	0010012	800	800
0010013	0010013	800	800
0010014	0010014	800	800
0010015	0010015	800	800
0010016	0010016	800	800
0010017	0010017	800	800
0010018	0010018	800	800
0010019	0010019	800	800
0010020	0010020	800	800
0010021	0010021	800	800
0010022	0010022	800	800
0010023	0010023	800	800
0010024	0010024	800	800
0010025	0010025	800	800
0010026	0010026	800	800
0010027	0010027	800	800
0010028	0010028	800	800
0010029	0010029	800	800
0010030	0010030	800	800
0010031	0010031	800	800
0010032	0010032	800	800
0010033	0010033	800	800
0010034	0010034	800	800
0010035	0010035	800	800
0010036	0010036	800	800
0010037	0010037	800	800
0010038	0010038	800	800
0010039	0010039	800	800
0010040	0010040	800	800
0010041	0010041	800	800
0010042	0010042	800	800
0010043	0010043	800	800
0010044	0010044	800	800
0010045	0010045	800	800
0010046	0010046	800	800
0010047	0010047	800	800
0010048	0010048	800	800
0010049	0010049	800	800
0010050	0010050	800	800
0010051	0010051	800	800
0010052	0010052	800	800
0010053	0010053	800	800
0010054	0010054	800	800
0010055	0010055	800	800
0010056	0010056	800	800
0010057	0010057	800	800
0010058	0010058	800	800
0010059	0010059	800	800
0010060	0010060	800	800
0010061	0010061	800	800
0010062	0010062	800	800
0010063	0010063	800	800
0010064	0010064	800	800
0010065	0010065	800	800
0010066	0010066	800	800
0010067	0010067	800	800
0010068	0010068	800	800
0010069	0010069	800	800
0010070	0010070	800	800
0010071	0010071	800	800
0010072	0010072	800	800
0010073	0010073	800	800
0010074	0010074	800	800
0010075	0010075	800	800
0010076	0010076	800	800
0010077	0010077	800	800
0010078	0010078	800	800
0010079	0010079	800	800
0010080	0010080	800	800
0010081	0010081	800	800
0010082	0010082	800	800
0010083	0010083	800	800
0010084	0010084	800	800
0010085	0010085	800	800
0010086	0010086	800	800
0010087	0010087	800	800
0010088	0010088	800	800
0010089	0010089	800	800
0010090	0010090	800	800
0010091	0010091	800	800
0010092	0010092	800	800
0010093	0010093	800	800
0010094	0010094	800	800
0010095	0010095	800	800
0010096	0010096	800	800
0010097	0010097	800	800
0010098	0010098	800	800
0010099	0010099	800	800
0010100	0010100	800	800

Dari tabel diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mendapat Nilai Kota Layak Anak sebesar 742.34, untuk skor predikat Kota Layak Anak :

- Pratama Skor 500 – 600
- Madya Skor 601 – 700
- Nindya Skor 701 – 800
- Utama Skor 801 – 900
- KLA Skor 901 – 1.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	/s/
Kepala Bagian Hukum	/s/
Plt. Kepala DPPPA	/s/

4. Persentase Penurunan Tindak Kekerasan terhadap Anak

Realisasi Target Indikator Persentase Penurunan Tindak Kekerasan terhadap Anak dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 **tidak mencapai target**, dimana kasus dari tahun ke tahun meningkat. Pencapaian Indikator Persentase Penurunan Tindak Kekerasan terhadap Anak tahun 2023 **tidak mencapai target**, dimana target Tahun 2023 sebesar 0,02% sedangkan realisasi sebesar 0,01% terjadi kenaikan 0,01%, ketidakcapaian target saat realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin kurang baik. Akan tetapi, semakin banyak kasus yang dilaporkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah keberhasilan dari Sosialisasi yang dilaksanakan di Sekolah-Sekolah yang ada di Kota Bekasi, sehingga banyak korban yang berani untuk melaporkan kasus yang terjadi pada diri sendiri atau dari tetangga, kerabat, dan keluarga korban tersebut.

5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan publik yang akuntabel

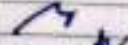
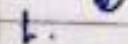
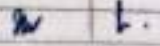
Realisasi Target Indikator meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan publik yang akuntabel dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 **mencapai target**, dimana realisasi melebihi dari target. Pencapaian Indikator kualitas pelayanan administrasi dan publik yang akuntabel Tahun 2023 **mencapai target bahkan melebihi dari target**, hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi berkinerja baik sehingga mencapai target, indikator sasaran akan tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan Capaian Indikator Program yang baik pula dan Indikator Program dapat tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan hasil Capaian Indikator Kegiatan yang baik dan untuk mendapat capaian indikator kegiatan yang baik, perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang ahli dan dukungan anggaran yang memadai. Adapun

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA	

rincian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak dijabarkan melalui tabel 2.2 adalah sebagai berikut :

38

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappedabangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pit. Kepala DPPPA	

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

No	Indikator	SPM /Standar nasional	IKK	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Predikat Amugerah Parahita Ekapraya	-	-	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	N/A	Madya	Madya	Belum terlaksana penilaian
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TI*PO	-	1 : 6.649	1 : 4.250	1 : 4.500	1 : 4.750	23,00	64,53	65,03	1 : 4.347	1 : 3.305	1 : 3.380	46,48	64,53	65,03	
3	Predikat Kota Layak Anak	500 – 1.000	-	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	742,35	742,36	Nindya	Nindya	Madya	Pratiama	742,35	742,36	Belum terbentuknya UPTD
4	Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak	-	100%	0,030%	0,025%	0,020%	0,029%	0,028%	0,027%	0,028%	0,024%	0,030%	0,027%	0,028%	0,027%	Delam H.K 100% untuk Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Anak
5	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan publik yang akuntabel	-	-	B (69)	B (75)	BB (76)	BB (75)	BB (75,10)	BB (75,10)	BB (75,37)	BB (76,41)	BB (76,99)	A (80,35)	A (75,10)	BB (75,37)	




Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.





Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pengkoordinasian norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPP	

penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penegakan peraturan perundang-undangan daerah urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pengkoordinasian pengentasan/penanggulangan kemiskinan;
- Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian dukungan pengelolaan kemitraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	 

- Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota dan/atau Sekretaris Daerah.

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan koordinasi dan sinergi program dengan beberapa kementerian dan lembaga. Ketiga urusan yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih terdapat permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah;
3. Masih banyaknya korban kekerasan pada anak;
4. Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan;
5. Belum optimal pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
6. Masih kurangnya peran forum anak;
7. Belum optimalnya kelembagaan PUG;
8. Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kab/kota;
9. Belum optimalnya pelaksanaan PPRG;
10. Belum optimalnya perempuan sebagai petugas profesional;
11. Belum banyaknya data terpilah gender dan data anak pada setiap Perangkat Daerah;
12. Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan/pada lembaga legislatif.

Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan tindak kekerasan terhadap anak Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPP	




berdampak pada program pembangunan daerah serta terhadap capaian program nasional seperti SDGs. Melihat dari permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, antara lain :

➤ Tantangan

- Kurangnya kuantitas SDM pada DPPP Kota Bekasi karena banyaknya ASN yang telah memasuki masa purnabhakti.
- Kurangnya sarana dan prasarana di Rumah Pintar.
- Belum optimalnya layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan anak akibat keterbatasan sarana dan prasarana.
- Kurangnya kegiatan promotif dan preventif terhadap permasalahan perempuan dari tindak kekerasan.
- Kurangnya SDM pelayanan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

➤ Peluang

- Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Tahun 2015-2030).
- Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPP	




pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan tantangan dan peluang di atas, maka dirumuskanlah isu-isu startegis yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2026, diantaranya :




1. Data partisipasi angkatan kerja perempuan yang sulit diperoleh karena tidak update-nya data kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan penerapan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili penduduk;
2. Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting System (GBS) belum disusun secara menyeluruh pada setiap Perangkat Daerah);
3. Kurangnya kegiatan promotif dan preventif terhadap permasalahan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
4. Kurangnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender;
5. Kurangnya peran masyarakat dalam pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
6. Meningkatnya kekerasan berbasis gender siber

2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD, dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pit. Kepala DPPP	

Bekasi. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya, melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Penjabaran dari rancangan awal rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPP	

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Kota Bekasi Tahun 2026

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Nilai AKIP	75,10%	8.886.876,144	PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100 %	10.017.471,400	
	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	10 Dokumen	39.000.000	
	-	-	-	-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	35.000.000	Penyusunan Laporan Perencanaan untuk Wali

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeditbangda	✓
Kepala Bagian Hukum	✓
PIL Kepala DPPPA	9

												Kota Terpilih 2024
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.000.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.937.934.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian kinerja keuangan penunjang urusan	90 %	9.437.971.400			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang	6.957.934.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.036 Orang/bulan	8.526.161.000			
Koordinasi dan Penyusunan	Kota Bekasi,	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan	Kota Bekasi, Semua	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	2.000.000			

Paraf Koordinasi

Kepala Bappedinbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA	

Laporan Keuangan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	75.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	605.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	635.310.400
Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang	3 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang	3 Paket	25.000.000

Paraf Koordinasi

Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
PIL Kepala DPPPA	

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Laporan	54.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	250.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	75.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	1 Laporan	53.400.000	Pembentukan UPTD PPA
Pengadaan Mebel	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	Pengadaan Mebel	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	53.400.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Boppelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPA	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel/Desa Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Disediakan	100%	873.942.244	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kel/Desa Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	2 Laporan	274.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	310.842.240	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	234.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	355.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	3 Laporan	487.100.000
Penyediaan Jasa	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah	6 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah	7 Unit	258.500.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelibangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPA	

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 Unit	13 Unit	203.600.000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	25 Unit	25.000.000		
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	77,95%	53,89 %	2.047.720.600		
PELEMBAGAAN		Kota Bekasi,	Jumlah Laporan	Kota Bekasi,	Pelembagaan	2 Laporan	2 Laporan	319.500.000		

50

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeditbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	



PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KAB/KOTA	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kegiatan Perimbangan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	44 OPD	430.000.000	Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kegiatan Perimbangan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Lembaga	175.000.000
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	44 OPD	430.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Kab/Kota	44 Lembaga	175.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	-	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	144.500.000
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah laporan kegiatan Pemberdayaan Perempuan	1 Laporan	325.000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	1 Laporan	1.728.220.800

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPA	

DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN AN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Kel/Desa	Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Organisasi	325.000.000	dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kel/Desa	Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	640 Orang	1.728.220.800
ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi Kebijakan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	40 Organisasi	325.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	640 Orang	1.728.220.800
Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, dan atau sosial, dan atau ekonomi	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan	-	-	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan	640 Orang	1.728.220.800

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	

Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	atau rentan lainnya yang mendapatkan birttek atau pelatihan	100%	3.075.000.000	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	atau rentan lainnya yang mendapatkan birttek atau pelatihan	-	-
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PERSENTASE PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	100%	3.075.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	-	-
ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PERSENTASE PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	4 Lembaga	1.525.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	-	-
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	Kota Bekasi, Semua Kecamatan,	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	100 Orang	1.225.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga	Kota Bekasi, Semua Kecamatan,	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia	-	-



 Paraf Koordinasi

Kepala Bupptelibangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA	

perempuan lingkup Daerah Tingkat Kab/Kota	Semua Kel/Desa	terhadap perempuan lingkup Daerah Tingkat Kab/Kota	Semua Kel/Desa	Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	Kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Tingkat Kab/Kota	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.048.275.000
Penyediaan Layanan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Layanan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan	
		65 Orang		380.000.000			

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA	



Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	115.000.000	115 Layanan				
								10 Orang	475.000.000


Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangca	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA	

Kewenangan Kabupaten/Kota	Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga	75.000.000	
		Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	3 Lembaga		
4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Posyandu Dalam Penyediaan 6 Layanan SPM	1622 Posyandu	36.980.000,000	
				Persentase pemenuhan Pusat Pembelajaran Keluarga (FUSPAGA) di Tingkat Kelurahan	38,29%	120.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Boppelbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	



				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Persentase Capaian Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Persentase Capaian Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.565.000.000	
				Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1.565.000.000	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	1 Laporan	35.415.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	



					Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	konseling lingkup Kabupaten/Kota		
5					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan data gender dan anak	23.90	195.000.000
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	195.000.000
					Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	195.000.000
6					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan hak anak dalam 5	75%	2.200.000.000
						Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Forum Anak Tingkat	37.68 %	1.611.868.000

51

Paraf Koordinasi	
	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA	

	Semua Kel/Desa	Kluster	100%	1.150.000.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	Kecamatan dan Kelurahan yang Ter-bentuk	2 Laporan	503.500.000
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	1.150.000.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	503.500.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	290 Organisasi	1.150.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	-	-
					Pendampingan	Kota Bekasi,	Jumlah OPD	21	363.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bupelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	

				Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	
				Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Laporan	140.500.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Kota Bekasi, Semua Kecamatan	100%	Persentase Penguatan dan Pengembangan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Kota Bekasi, Semua Kecamatan	Persentase Capaian Pelaksanaan	2 Laporan	1.108.368.000

63

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeditbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2364 Orang	725.000.000	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2364 Orang	725.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	3 Dokumen	325.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeditbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA	



Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	829 Orang	628.168.000
						Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan birttek	
						Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	480.200.000
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100%	2.030.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penanganan kasus terhadap anak	1.594.650.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPA	






	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	325.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	254.400.000	komprehensif
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peranglat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Pogram dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Perangkat Daerah	325.000.000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	-	-	
					Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTA kepada pengambil	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan	2 Kegiatan	254.400.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelibangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	



Banyaknya kegiatan-kegiatan yang menjadi usulan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi terkait dengan kegiatan Posyandu, forum anak dan pelatihan/pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini sesuai dengan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, yaitu tentang pemenuhan hak-hak anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	

yl

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DPPP A KOTA BEKASI




3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu yang menjadi rujukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bekasi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah Kebijakan Nasional. Merujuk pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini memiliki tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah :

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

- Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antarbangsa semakin kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPP A	




merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

- Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.
- Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan :
 1. Taraf kehidupan;
 2. Memperoleh lapangan pekerjaan;
 3. Mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik;
 4. Mengamankan dan mempertahankan negara;
 5. Mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Dengan demikian, bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Arah Kebijakan pembangunan nasional tahun 2025 menekankan pada :

1. Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi;
2. Arah Kebijakan Tingkat Pengangguran Terbuka;
3. Arah Kebijakan Tingkat Kemiskinan;
4. Arah Kebijakan Rasio Gini;
5. Arah Kebijakan Indeks Modal Manusia;




Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPP	

6. Arah Kebijakan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca;
7. Arah Kebijakan Nilai Tukar Petani;
8. Arah Kebijakan Nilai Tukar Nelayan.




Merujuk kepada 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional tersebut, kemudian diuraikan oleh Pemerintah Kota Bekasi ke dalam Isu Strategis Pemerintah Kota Bekasi yang dimuat dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Strategi Utama Kota Bekasi Tahun 2025. Kesenambungan antara Prioritas Nasional, Isu Strategis Kota Bekasi dan Strategi Utama Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Korelasi antara Prioritas Nasional, Isu Strategis, dan Strategi Utama Kota Bekasi Tahun 2025




NASIONAL	TUJUAN		SASARAN		FOKUS UTAMA	
	1	SDM Berkualitas	1.1	Transformasi Sosial	A	Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun;
			1.2	Ketahanan sosial budaya dan ekologi	B	Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan;
					C	Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting;
					D	Penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif;
					E	Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STM berkualitas;
					F	Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan <i>dual system</i> ;
					G	Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: budi pekerti).
	2	Infrastruktur Berkualitas	2.1	Transformasi Ekonomi	A	Penetapan hub. laut dan hub. udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
			2.2	Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	B	Penguatan infrastruktur digital;
					C	Pengembangan infrastruktur transisi energi;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA	







				D	Percepatan infrastruktur IKN;
				E	Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
	3	Perekonomian Berkualitas	3.1	Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	A Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); B Pengembangan skema graduasi Bansos; C Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; D Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; E Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; F Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; G Peningkatan produksi industri pengolahan; H Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; dan Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung I Transisi Energi.
	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR
PROVINSI JAWA BARAT	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang <i>Cageur</i> (sehat jasmani dan rohani), <i>Bageur</i> (rendah hati), <i>Bener</i> (memegang teguh aturan dan hukum), <i>Pinter</i> (menguasai ilmu Pengetahuan), dan <i>Singer</i> (kreatif dan inovatif)				Indeks Modal Manusia (poin)
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (tahun)
					Prevalensi Stunting (persen)
			Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) serta kesetaraan gender		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (poin)
					Indeks Ketimpangan Gender (poin)
					Indeks Perlindungan Anak (poin)
					Indeks Pembangunan Pemuda (poin)
		Meningkatnya ketahanan daerah mencakup ketentraman, ketertiban umum, keadilan hukum	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)		
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (poin)		
			Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat (poin)		

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	


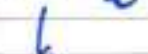

		dan perlindungan masyarakat yang beragama dan berbudaya	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (poin)
			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (persen)
		Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)
			Harapan Lama Sekolah (tahun)
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi berbasis sumber daya lokal dan teknologi			Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)
		Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah yang ramah lingkungan dan Inklusif	Kontribusi PDRB Provinsi (persen)
		Meningkatnya penerapan ekonomi hijau dan biru	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (poin)
			Indeks Ekonomi Biru (poin)
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (persen)
		Terkendalinya stabilitas ekonomi daerah	Tingkat Inflasi (persen)
			Inklusi Keuangan (persen)
		Meningkatnya digitalisasi pada sektor-sektor ekonomi strategis daerah	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (poin)
	Indeks Transformasi Digital		
	Terwujudnya Swasembada Pangan Jawa Barat	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (persen)	
Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan			PDRB per Kapita ADHB (juta rupiah)
		Meningkatnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja baru	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (persen)
			Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen)
			Ekspor Barang dan Jasa (persen)
		Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Nilai Tukar Petani (poin)
	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung		
		Meningkatnya	Indeks Kualitas

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPP	

	Infrastruktur, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas serta Lingkungan yang Berkelanjutan	pembentukan kawasan perkotaan dan perdesaan yang nyaman, layak, maju, inklusif, dan berkelanjutan	Infrastruktur (poin) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (persen)	
		Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (persen) Indeks Kesejahteraan Sosial (poin)	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (poin) Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif (persen) Tahunan (persen)	
		Menurunnya Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	
		Terciptanya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan bersih	Indeks Daya Saing Daerah (poin) Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat (poin)	
		Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi (poin) Indeks Integritas Nasional (poin) Indeks Pelayanan Publik (poin)	
			Meningkatnya penerapan iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah
			Meningkatnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan	Indeks Partisipasi Publik (poin) Indeks Demokrasi Indonesia (poin)
	KOTA BEKASI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
		Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (nilai)
Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern			Pilar Infrastruktur IDSD (nilai)	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari			Penurunan Intensitas Emisi GRK (ton O ₂ eq/miliar)	
Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim		Indeks Risiko Bencana (nilai)		
Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang		Indeks Pembangunan Manusia (poin) Meningkatnya Rata-rata Skor Literasi		

Paraf Koordinasi	
 Kepala Bappelitbangda	
 Kepala Bagian Hukum	
 Plt. Kepala DPPPA	

berbudaya, humanis dan harmonis	pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata	dan Numerasi Siswa 7-15 Tahun (nilai)
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (tahun)
		Usia Harapan Hidup (tahun)
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (persen)
	Meningkatnya ketangguhan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)
	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (nilai)
	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Nilai Kota Layak Anak (nilai)
Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi yang tangguh dan inklusif		PDRB Per Kapita (juta rupiah)
	Meningkatnya ekonomi kota yang bertumpu pada perdagangan, jasa dan industri	Proporsi PDRB Perdagangan (persen) Proporsi PDRB Industri Pengolahan (persen)
	Berkembangnya pariwisata kota, ekonomi kreatif dan digital	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (persen)
	Meningkatnya ketahanan pangan kota	Indeks Ketahanan Pangan (poin)
	Meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (persen)
Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)
		Rasio Gini (poin)
		Indeks Daya Saing Daerah (poin)
	Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Pilar Dinamisme Bisnis IDSD (nilai)
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia (nilai)
	Meningkatnya kerja sama kota yang efektif	Efektivitas Kerja Sama Kota (persen)
Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi (nilai)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (nilai)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (nilai)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA	

			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (nilai)
			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (poin)
		Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas	Indeks Kota Cerdas (poin)

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029




Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi selaku pengemban 3 urusan pemerintahan, yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemenuhan hak anak dan urusan pencegahan dan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak, memiliki kontribusi dalam mendukung agenda pembangunan yakni :

1. Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis :

- Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata
 - ✓ Rata-rata Skor Literasi dan Numerasi Siswa 7-15 Tahun
 - ✓ Harapan Lama Sekolah
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - ✓ Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
- Meningkatnya kesetaraan gender
 - ✓ Indeks Ketimpangan Gender
- Meningkatnya pemenuhan hak anak
 - ✓ Nilai Kota Layak Anak

2. Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima
 - ✓ Indeks Kepuasan
 - ✓ Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota
 - ✓ Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPP	

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga menciptakan manajemen kinerja yang bertujuan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.




Kota Bekasi akan memiliki generasi anak yang cerdas, ceria dan berkualitas apabila mampu menjamin pemenuhan hak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah lainnya pada anak. Dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia dan masyarakat yang berkualitas diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan yang disertai dengan meningkatnya kesetaraan gender diseluruh bidang pembangunan, serta pencegahan dan penanganan tindak kekerasan perempuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan penjabaran dari tahun pertama Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi periode Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dengan tetap berpedoman pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

Tujuan pembangunan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak :

1. Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan.
2. Meningkatkan kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
3. Meningkatkan Capaian Kota Layak Anak.
4. Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPP	

5. Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak.
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- Indeks Pembangunan Gender (IPG).
- Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapat layanan Komprehensif.
- Kota Layak Anak.
- Rasio Kekerasan terhadap Perempuan TPPO.
- Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani.
- Indeks Reformasi Birokrasi (RB).


Tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategis jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sasaran merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, dan dialokasikan dalam 4 (empat) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Nilai AKIP	Nilai	BB 80.35	BB 80.36	BB 80.37	BB 80.38	BB 80.39	BB 80.40
		Meningkatnya	Nilai AKIP	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB

104

Paraf Koordinasi	
	Kepala Bappelitbangda
	Kepala Bagian Hukum
	Plt. Kepala DPPPA

	kuualitas pelayanan publik yang akuntabel		80.35	80.36	80.37	80.38	80.39	80.40	
2	Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	93.66	93.80	93.94	94.08	94.22	94.36
		Persentase ARG pada belanja operasional dan belanja modal	%	53.39	53.89	54.39	54.89	55.39	55.89
	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21
	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	64.53	65.03	65.53	66.03	66.53	67.03
	Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Predikat Kota Layak Anak	%	74	75	76	77	78	79
	Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	64.40	64.90	65.40	65.90	66.40	66.90

Sumber : Dokumen Rencana Strategi DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Paraf Koordinasi	
Yh	Kepala Bappelitbangda
	Kepala Bagian Hukum
	Plt. Kepala DPPPA




Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tabel 3.2.b dan isu-isu penting yang perlu diselesaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, maka prioritas kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 antara lain :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah
3. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan
4. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Program dan kegiatan Rencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Selain untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, program dan kegiatan renja juga disusun untuk mendukung Sustainable Development Goal's (SDGs). Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs berdasarkan Metadata 1 Indonesia, terdapat 319 indikator dan 169 target untk pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs. Upaya pencapaian indikator TPB/SGDs tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota berdasarkan pembagian kewenangan dan kekhususan indikator terkait kondisi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	

geografis, sedangkan metadata II terdapat 289 indikator tetapi belum ada pemilahan perkwenangan.

Tabel 3.3.1.1
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)



Metadata TPB/SDGs yang dipergunakan untuk Kota Bekasi adalah metadata I, terdapat 199 indikator TPB/SDGs yang relevan bagi Kota Bekasi. Rangkuman capaian setiap target TPB/SGDs Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1.2
Rangkuman Analisis Capaian TPB/SDGs di Kota Bekasi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Indikator Terlaksana dan Target Nasional Tercapai (SA)	Indikator Terlaksana dan Target Nasional Belum Tercapai (SB)	Indikator tidak Memiliki Data (NA)	Jumlah Indikator
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	13	9	3	25
TPB 2	Tanpa Kelaparan	6	1	4	11
TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	18	11	5	34

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	




TPB 4	Pendidikan Berkualitas	8	4	1	13
TPB 5	Kesetaraan Gender	7	3	1	11
TPB 6	Air Bersih dan Sanitasi Berkelanjutan	6	6	6	18
TPB 8	Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak	5	7	7	19
TPB 9	Infrastruktur, industri dan inovasi	3	3	3	9
TPB 10	Mengurangi Kesenjangan Antarnegara	1	2	0	3
TPB 11	Kota dan Pemukiman yang Aman dan Berkelanjutan	4	5	2	11
TPB 12	Pola Produksi dan Konsumen Berkelanjutan	1	1	2	4
TPB 13	Mengatasi Perubahan Iklim	1	1	0	2
TPB 15	Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	2	0	1	3
TPB 16	Masyarakat yang Inklusif dan Damai	6	8	7	21
TPB 17	Sarana Revitalisasi Kemitraan Global	6	5	4	15
Jumlah		87	66	46	199
%		43,72	33,16	23,11	100

Sumber : Laporan KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2023

TPB/SDG's diadopsi secara nasional melalui Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) 2022 – 2026. Kemudian setiap daerah, termasuk Pemerintah Kota Bekasi, membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) 2022 – 2026 dan disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi kemudian melakukan diskusi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Bekasi untuk penetapan target setiap indikator dalam RAD TPB/SDG's 2022 - 2026.

Sesuai tugas dan fungsinya, pada penyusunan Dokumen RAD TPB/SDG's 2022 – 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri berkontribusi dalam penetapan target indikator dalam Tujuan berikut:

Tujuan Ke-5 : Kesetaraan Gender - Menjamin Kesetaraan Gender Serta Memberdayakan Seluruh Perempuan. Pada tujuan ini, indikator yang berkaitan dengan program – program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah yang

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA	

berhubungan dengan kesetaraan gender, penghapusan diskriminasi, penghapusan kekerasan, pencegahan pernikahan usia dini, kesetaraan akses dalam bidang politik, ekonomi, dan teknologi.

Tujuan Ke-16 : Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh - Mendorong Masyarakat yang Damai dan Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan bagi Semua Orang termasuk Lembaga dan Bertanggungjawab untuk Seluruh Kalangan, serta Membangun Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Seluruh Tingkatan. Pada tujuan ini, indikator yang berkaitan dengan program – program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah yang berhubungan dengan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di bawah umur, penanganan dan advokasi korban kekerasan, serta pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Selain Tujuan di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui berbagai program dan kegiatannya juga mendukung pencapaian Tujuan TPB/SDG's berikut :

Tujuan Ke-1 : Tanpa Kemiskinan - Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan dimanapun.

Tujuan Ke-2 : Tanpa Kelaparan - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

Tujuan Ke-3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.




Tujuan Ke-4 : Pendidikan Berkualitas - Menyediakan Akses Pendidikan yang Inklusif, Adil, dan Berkualitas bagi Semua Orang.

Tujuan Ke-10 : Berkurangnya Kesenjangan - Mengurangi Kesenjangan di Dalam dan di antar Daerah.

Tujuan Ke-11 : Kota dan Pemukiman Berkelanjutan - Menjadikan Kota dan Pemukiman Manusia Inklusif, Aman, Berketahanan dan Berkelanjutan.

3.3.2 Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

Penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada




Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	

RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026, dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berikut ini merupakan rancangan akhir program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, antara lain :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA :**




1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPP	

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPP	

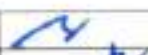


- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)




1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPP	

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA.
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPP	




BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPPPA KOTA BEKASI

Rencana Kerja (Renja) dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang juga selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rencana kerja Pemerintah Daerah memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, beserta rencana pendanaannya. Ketersediaan pendanaan ini digunakan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu dan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdiri atas program, kegiatan yang telah dilengkapi dengan kinerja, indikator kinerja serta satuan.

Berdasarkan Penetapan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2025, Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan prioritas belanja daerah yang dibagi ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua dan prioritas ketiga, sebagaimana perhitungan kapasitas riil keuangan daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun klasifikasi prioritas belanja tersebut, sebagai berikut :

- a. Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, dengan ketentuan :
 - Belanja wajib merupakan belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga dan bunga pinjaman yang telah

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	




jatuh tempo.

- Belanja mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja pembayaran tagihan telepon, air dan internet.
- b. Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai pencapaian prioritas daerah, dengan mengacu pada rancangan RKPD Tahun 2025-2030.
- c. Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai pencapaian prioritas Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi SKPD pemberi rekomendasi hibah kepada lembaga dan organisasi masyarakat, dimana rekomendasi hibah diberikan berdasarkan hasil telaah terhadap proposal pengajuan hibah lembaga dan organisasi terkait. Dana hibah yang telah disetujui dan disepakati tersebut menjadi bagian dari pagu indikatif Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026, dengan anggaran sebesar Rp 35.976.766.037,- (tiga puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah). Hibah ini terdiri dari :

1. Hasil Reses Dewan sebesar Rp. 1.002.000.000,- (satu milyar dua juta rupiah)
2. Hibah PKK sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)
3. Hibah DWP sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
4. Hibah IKIAD sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
5. Hibah KPAD sebesar Rp. 468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah)
6. Hibah Posyandu sebesar Rp. 32.556.766.037 (tiga dua milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah)

Rencana pendanaan APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan




Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	

Perlindungan Anak untuk membiayai 7 program yang terdiri dari 6 program urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 1 program penunjang urusan pemerintah daerah. Total alokasi rencana pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp 49.695.565.237,- (empat puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta). Ringkasan rencana pendanaan APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Pendanaan APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2025

No	SKPD/SEKRETARIAT/ BIDANG	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat	1	6	18	8.916.279.400
2	Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Keluarga	2	5	6	36.254.486.837
3	Bidang Pemenuhan Hak Anak	1	2	4	1.611.868.000
4	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	3	6	7	2.912.931.000
TOTAL		7	19	35	49.695.565.237

Pendanaan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2026 tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, dengan rinci rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2026 :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPP	

TABEL 4.2
RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI
TAHUN 2026

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	PAGU ANGGARAN			KET
			PAGU SEBELUM EFISIENSI	PAGU SESUDAH EFISIENSI	PAGU PENYESUAIAN RINCIAN BELANJA 23 OKTOBER 2025	
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		53.774.991.200	49.815.565.237	49.815.565.237	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		10.017.471.000	8.916.279.000	8.916.279.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSRF	39.000.000	39.000.000	39.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koevaluasi Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSRF	8.326.161.000	7.476.994.000	7.476.994.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappellithbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	



3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.526.161.000	7.424.969.000	7.424.969.000
4	Kondisi dan Penyusunan Laporan Kinerja Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah yang dibantu sesuai NSPK	274.000.000	274.000.000	274.000.000
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	40.000.000	40.000.000	40.000.000
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	234.000.000	234.000.000	234.000.000
	Administrasi Umum Perangko Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangko Daerah yang dibantu sesuai SPK	655.810.400	655.810.400	655.810.400
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15.000.000	15.000.000	15.000.000
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	285.000.000	285.000.000	285.000.000
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	91.500.000	91.500.000	91.500.000
10	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peralang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Peralang-undangan yang disediakan	20.000.000	20.000.000	20.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	




11	Facilities Kurjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kurjungan Tamu	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunitas SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunitas SKPD	144.310.400	144.310.400	144.310.400	144.310.400
13	Penunjabahan Asep Diseminasi pada SKPD	Jumlah Dokumen Penunjabahan Asep Diseminasi pada SKPD	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemertintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemertintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Erusan Pemertintah Daerah	Jumlah Laporan pengadaan barang milik daerah yang dipelbharu	53.400.000	53.400.000	53.400.000	53.400.000
15	Perbaikan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaharui	53.400.000	53.400.000	53.400.000	53.400.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemertintahan Daerah	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dipelbharu	487.100.000	487.100.000	487.100.000	487.100.000
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kematangan Perawatan Unit atau Keseluruhan Ditema Jabatan	Jumlah Kebutuhan Perawatan Ditema atau Keseluruhan Ditema Jabatan yang Diperbaharui dan diperbaharui	258.500.000	258.500.000	258.500.000	258.500.000
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Keseluruhan Ditema Operasional atau Lapangan yang Diperbaharui dan diperbaharui	Jumlah Kebutuhan Ditema Operasional atau Lapangan yang Diperbaharui dan diperbaharui	203.600.000	203.600.000	203.600.000	203.600.000
18	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaharui	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA	



	PROGRAM PENGARUHSUTAMAHAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Percentase Anggaran Besaran Gender (AHG)	2.847.720.800	2.847.720.800	2.847.720.800
	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemberdayaan Kewomunitarian Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemberdayaan Kewomunitarian Kabupaten Kota	119.500.000	119.500.000	119.500.000
19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewomunitarian Kabupaten Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewomunitarian Kabupaten Kota	144.500.000	144.500.000	144.500.000
20	Pendukung Penyelenggaraan PUG Kewomunitarian Kabupaten Kota	jumlah OPD Kabupaten Kota yang melakukan pendampingan	175.000.000	175.000.000	175.000.000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kewomunitarian Kewomunitarian Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kewomunitarian Kewomunitarian Kabupaten Kota	1.728.220.800	1.728.220.800	1.728.220.800
21	Pengembangan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewomunitarian Kabupaten Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau trauma lainnya yang mendapatkan bimbingan atau pelatihan	1.728.220.800	1.728.220.800	1.728.220.800
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Percentase persentase korban kekerasan dan TPO yang mendapatkan layanan komprehensif	1.123.275.000	1.123.275.000	1.088.250.000
	Penyediaan Layanan Bantuan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewomunitarian Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Layanan Bantuan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewomunitarian Kabupaten Kota	1.048.775.000	1.048.775.000	1.013.250.000
22	Layanan nambuh perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota	jumlah Penyempurnaan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan nambuh perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota	475.000.000	475.000.000	475.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeditbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pjt. Kepala DPPP	



23	Layanan pendampingan keluarga bagi Penerimaan Kerjaan Kekerabatan Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Perencanaan Kerfian Kekerabatan yang mendapatkan pendampingan kerfian Tingkat Kabupaten Kota	573.275.000	573.275.000	573.275.000
	Pengantar dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perbandingan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Layanan Kegiatan Pengantar dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perbandingan Perempuan Kabupaten Kota	75.000.000	75.000.000	75.000.000
24	Advokasi dan sosialisasi program dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perbandingan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perbandingan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	75.000.000	75.000.000	75.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Penerimaan Bakti Peningkatan 6 Layanan SPN	34.286.766.017	34.286.766.017	34.286.766.017
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Meningkatkan Peranase Capaian Kewenangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Meningkatkan Peranase Capaian Kewenangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	1.650.000.000	1.650.000.000	1.650.000.000
25	Pengantar kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lima Kabupaten Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lima Kabupaten Kota	1.650.000.000	1.650.000.000	1.650.000.000
	Pengantar dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Meningkatkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pengantar dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Meningkatkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten Kota	12.556.766.017	12.556.766.017	12.556.766.017
26	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	32.556.766.017	32.556.766.017	32.556.766.017

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	



	<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang layak kelarganya dalam daerah Kabupaten Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Ekspansi Penyelidikan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang layak kelarganya dalam Daerah Kabupaten Kota</i>	1.20.000.000	1.20.000.000	1.20.000.000	1.20.000.000
27	Layanan Konsultasi dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Linggah Kabupaten Kota	Jumlah Keluarga mendapatkan layanan konsultasi dan konseling linggah Kabupaten Kota	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Perentase pemenuhan data gender dan anak	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000
	<i>Pengawasan, Pengabdian, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelengkapan Data di Tingkat Daerah Kabupaten Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan, Pengabdian, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelengkapan Data di Tingkat Daerah Kabupaten Kota</i>	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000
28	Penyediaan, Penyajian, dan Pemenuhan Data Gender dan Anak Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten Kota yang Tersedia	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PIHA)	Perentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terbentuk	1.611.800.000	1.611.800.000	1.611.800.000	1.611.800.000
	<i>Pelaksanaan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota</i>	501.500.000	501.500.000	501.500.000	501.500.000
29	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota	jumlah OPD/Layanan yang mendapatkan pendampingan pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota	303.000.000	303.000.000	303.000.000	303.000.000
30	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota	140.500.000	140.500.000	140.500.000	140.500.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	



	Programas dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pendidikan Kualitas Hidup Anak Kecamatan Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pendidikan Kualitas Hidup Anak Kecamatan Kabupaten Kota	1.100.362.000	1.100.362.000	1.100.362.000
31	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Pendidikan Kualitas Hidup Anak Kecamatan Kabupaten Kota	Jumlah SEMI bantuan penyedia layanan Pendidikan Kualitas Hidup Anak Kecamatan Kabupaten Kota yang mendapatkan hibah	628.168.000	628.168.000	628.168.000
32	penggiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Pendidikan Kualitas Hidup Anak Kecamatan Kabupaten Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Pendidikan Kualitas Hidup Anak Kecamatan Kabupaten Kota	480.200.000	480.200.000	480.200.000
	PROGRAM PEBELUNGGAN KEBUSUS ANAK	Preventive anak menentusias perkembangan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	1.594.656.000	1.594.656.000	1.629.681.000
	Penggiatan Ekstrakurikuler Terpadu Anak yang Merlibatkan para Pihak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Penyediaan Fasilitas Kegiatan Ekstrakurikuler Terpadu Anak yang Merlibatkan para Pihak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	254.400.000	214.400.000	254.400.000
33	Advokasi dan sosialisasi pencegahan FTA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kecamatan Kabupaten Kota	Jumlah pertemuan kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan FTA tingkat Kabupaten Kota	254.400.000	254.400.000	254.400.000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Menurunkan Produktivitas Khusus yang Menurunkan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Menurunkan Produktivitas Khusus yang Menurunkan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	872.256.000	872.256.000	894.214.000
34	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten Kota	872.256.000	872.256.000	894.214.000
	Programas dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Menurunkan Produktivitas Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Menurunkan Produktivitas Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Kota	460.800.000	460.800.000	481.807.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappellitbangda	
Kepala Bagian Hukum	
Pt. Kepala DPPPA	



35	pengantar kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	468.000.000	468.000.000	481.667.000
	TOTAL	TOTAL	53.774.991.200	49.815.565.237	40.815.565.237

Paraf Koordinasi	
Kepala BappediBangda	
Kepala Bagian Hukum	
Plt. Kepala DPPPA	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 merupakan perubahan perencanaan kerja untuk periode Tahun 2026, renja yang akan diusulkan merupakan penjabaran dari tahun pertama Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2030. Fungsi Renja adalah sebagai usulan selanjutnya setelah rancangan awal renja serta pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dokumen perubahan ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Selain berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2030, Renja Perubahan ini juga disusun dengan berpedoman pada Rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Perubahan akan melalui proses tahapan perencanaan anggaran hingga dapat disahkan dan dijabarkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) sudah berdasarkan isu strategis yang berkembang, masukan dari perangkat daerah/stakeholder/masyarakat dan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi.

Dengan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2026 ini, diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus ukuran dari keberhasilan kinerja yang di laksanakan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi.

Bekasi, September 2025

Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK



drh. SATIA SRIWJAYANTI LANGGRAINI, M.M
NIP. 19710608 199803 2 003